

PENILAIAN KINERJA ATAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

**Ni Ketut Novi Trisna Dewi¹
Eka Ardhani Sisdyani²**

**¹Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: novitrisna@gmail.com**

²Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik harus memperhatikan konsep *value for money* yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ditinjau dari sudut ekonomi, efisiensi, dan efektifitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menghitung rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengamati perkembangan atau fluktuasi persentase rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas setiap tahun. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran adalah ekonomis, sangat efisien, dan sangat efektif.

Kata Kunci: *ekonomi, efisiensi, efektivitas, value for money*

ABSTRACT

Measuring performance of public sector organizations should be done by paying attention to the concept of value for money that is based on three main elements, such as economy, efficiency and effectiveness. This study aims to examine performance of Dinas Pendapatan Daerah of Karangasem regency for the years 2007-2011 on hotel and restaurant tax revenue from the perspectives of economy, efficiency and effectiveness. Data are analysed using quantitative and qualitative analysis. Quantitative analysis is done by calculating economy, efficiency, and effectiveness ratios. Qualitative analysis was performed by observing the progression or fluctuation of the percentage ratios of economy, efficiency, and effectiveness during the periods of observations. The results show that the performance of Dinas Pendapatan Daerah Karangasem regency on hotel and restaurant tax revenue is economical, highly efficient, and very effective.

Keywords: *economy, efficiency, effectiveness, value for money*

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah memiliki wewenang yang relatif luas terhadap segala urusan yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Yang menjadi perhatian daerah adalah kebebasan untuk mengelola masalah keuangan sendiri. Dalam hal ini pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memiliki kemampuan mencari pemasukan sendiri agar pembangunan di daerah masing-masing dapat berjalan sesuai dengan rencana (Roni, 2009). Akibat dari luasnya otoritas yang diberikan kepada daerah adalah adanya tuntutan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat akan semakin besar (Puspitaningrum, 2008).

Era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang lebih luas mengakibatkan semakin kuatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Adi Erawati, 2009). Pengukuran kinerja instansi perlu untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam menilai keberhasilan maupun pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam mewujudkan visi dan misi dari instansi pemerintah (Nugrahani, 2007). Mardiasmo (2006) menyatakan, implementasi konsep *value for money* diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya ketidakefisienan, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik.

Perpindahan sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi berarti adanya suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Sejalan dengan itu, maka daerah menentukan semua kewenangan pengaturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dari hasil daerahnya sendiri. APBD yang dibuat harus transparan, akuntabel, dan tentunya mencerminkan kemandirian daerah. Untuk mencapai kemandirian daerah, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menggali potensi daerahnya, untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kontribusi terbesar terhadap PAD di Provinsi Bali adalah di sektor pariwisata. Karangasem, salah satu kabupaten di Provinsi Bali yang dulunya dikenal sebagai daerah yang miskin dan tertinggal, telah mampu meningkatkan pembangunannya di berbagai sektor. Salah satunya dari sektor pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik. Jumlah pendirian hotel dan restoran pun terus meningkat, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisata, Jumlah Hotel dan Jumlah Restoran di Kabupaten Karangasem Tahun 2007- 2011

Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata (Orang)	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran
2007	147.473	215	118
2008	249.675	236	131
2009	293.310	260	164
2010	365.372	284	196
2011	411.051	332	237

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem, 2012

Kabupaten Karangasem yang terletak di ujung timur Pulau Bali, memiliki topografi bervariasi yaitu berupa dataran rendah, perbukitan, pegunungan, persawahan, dan juga memiliki pantai yang menjadi kawasan wisata yang banyak digemari oleh wisatawan. Peningkatan kualitas di bidang pariwisata terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Karangasem, karena Kabupaten Karangasem memiliki potensi kunjungan wisata yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Karangasem.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah di Kabupaten Karangasem, tentunya harus didukung oleh dana yang cukup besar. Dana pembangunan tersebut didapatkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, dimana Kabupaten Karangasem memiliki PAD yang relatif besar dari sektor penerimaan pajak daerah. Ini diketahui berdasarkan realisasi PAD Kabupaten Karangasem. Realisasi PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011 dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011 (dalam jutaan rupiah)

Sumber PAD	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pajak Daerah	16.268	23.288	27.879	33.222	82.255
Hasil Retribusi Daerah	4.984	6.743	7.337	8.208	7.925
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.431	5.308	6.601	7.460	8.748
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.940	6.862	5.944	3.799	30.610

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari keempat sumber PAD, kontribusi terbesar bagi PAD Kabupaten Karangasem dari tahun 2007-2011 adalah dari pajak daerah. Berikut disajikan realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten Karangasem pada Tabel 3.

Tabel 3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011 (dalam jutaan rupiah)

Pajak Daerah	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Pajak Hotel dan Pajak Restoran	7.286	11.711	14.009	13.062	17.347
Pajak Hiburan	153	327	24	41	32
Pajak Reklame	308	298	327	350	351
Pajak Penerangan Jalan	3.260	3.764	4.052	5.117	5.415
Pajak Galian Golongan C	5.261	7.188	9.453	14.639	56.601
Pajak Parkir	-	-	13	11	16
Pajak Air Tanah	-	-	-	-	848

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012

Tabel 3 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata yaitu pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang besar setiap tahun bagi PAD Kabupaten Karangasem, sejalan dengan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Karangasem yang meningkat tiap tahunnya. Pembangunan hotel-hotel dan restoran-restoran pun semakin bertambah di seluruh kawasan wisata yang berada di Kabupaten Karangasem. Namun pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan, padahal jumlah kunjungan wisata, jumlah pendirian hotel dan restoran terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Perolehan PAD di Kabupaten Karangasem yang terus meningkat, mengakibatkan kesejahteraan masyarakat Karangasem semakin meningkat juga, ini terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Namun dilihat dari IPM Provinsi Bali, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karangasem paling rendah dibandingkan dengan kabupaten lainnya, walaupun setiap tahunnya PAD mengalami peningkatan. Jika melihat keadaan yang sebenarnya di Kabupaten Karangasem, saat ini masih banyak ditemukan rumah tangga miskin yang tersebar di berbagai kecamatan di Karangasem. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem tidak melakukan pemerataan secara tepat terkait dengan kesejahteraan masyarakat Karangasem. Tabel 4 menunjukkan IPM Provinsi Bali Tahun 2007-2011.

Tabel 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007-2011

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011
Jembrana	71.40	72.02	72,45	72,69	73,18
Tabanan	73.11	73.73	74,26	74,57	75,24
Badung	73.64	74.12	74,49	75,02	75,35
Gianyar	71.66	72.00	72,43	72,73	73,43
Klungkung	69.01	69.66	70,19	70,54	71,02
Bangli	69.46	69.72	70,21	70,71	71,42
Karangasem	65.11	65.46	66,06	66,42	67,07
Buleleng	69.15	69.67	70,26	70,69	71,12
Denpasar	76.59	77.18	77,56	77,94	78,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2012

Penelitian ini dilakukan untuk menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem atas penerimaan pajak daerah dari sektor pariwisata yaitu pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan konsep *value for money*. Hal ini didasarkan dari kondisi di Kabupaten Karangasem yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu adanya pengukuran kinerja untuk menilai akuntabilitas organisasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan konsep *value for money*?”.

KAJIAN PUSTAKA

Penilaian Kinerja Dalam Sektor Publik

Menurut Bastian (2006:274), kinerja adalah gambaran dari pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan baik secara fisik maupun non fisik yang dicapai oleh karyawan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi atau hasil yang dicapai oleh suatu instansi dalam periode tertentu.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan utama penilaian kinerja adalah untuk memberikan motivasi pada setiap karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut (Mulyadi, 2001:415).

Value For Money

Boisclair (2008) menyatakan bahwa *value for money* digunakan dalam meneliti kemampuan organisasi pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dan mengontrol biaya dengan memastikan bahwa sumber daya yang

dikelola atau *input* yang digunakan dengan biaya terendah dan kegiatan diselenggarakan secara efisien. Penilaian kinerja dengan konsep *value for money* mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Bastian (2006:77), pengertian ekonomi adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli dengan kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas menunjukkan kesuksesan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem di Jalan Ngurah Rai Amlapura.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data mengenai realisasi penerimaan PAD Kabupaten Karangasem, data realisasi penerimaan pajak daerah, data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Karangasem, anggaran biaya dan realisasi biaya yang dikeluarkan dalam memungut pajak hotel dan pajak restoran, serta gambaran umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem.

Teknik Analisis Data

1. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan *value for money*. Perhitungan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1) Rasio ekonomi

$$\frac{\text{Realisasi biaya untuk memungut pajak hotel dan/atau pajak restoran}}{\text{Anggaran biaya untuk memungut pajak hotel dan/atau pajak restoran}} \times 100\% \dots (1)$$

Adapun kriteria ekonomis penilaian kinerja keuangan menurut Mahsun (2006) pada Tabel 5 yaitu.

Tabel 5 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 100%	Ekonomis
Sama dengan 100%	Ekonomis berimbang
Lebih dari 100%	Tidak ekonomis

Sumber: Mohamad Mahsun, 2006

2) Rasio efisiensi

$$\frac{\text{Biaya dikeluarkan untuk memungut pajak hotel dan/atau pajak restoran}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan/atau pajak restoran}} \times 100\% \dots (2)$$

Adapun kriteria efisiensi penilaian kinerja keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu.

Tabel 6 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

3) Rasio efektivitas

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel dan/atau pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak hotel dan/atau pajak restoran}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Adapun kriteria efektivitas penilaian kinerja sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 yaitu.

Tabel 7 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

2. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif berupa keterangan atau penjelasan yang bersifat memperkuat atas hasil yang diperoleh dari analisis kuantitatif yang nantinya dapat memberikan penjelasan terhadap kesimpulan yang didapatkan dan mempermudah dalam mengambil suatu keputusan.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penilaian Kinerja atas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berdasarkan Rasio Ekonomi

Pajak hotel

Perhitungan rasio ekonomi dari kinerja penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 8.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realiasi biaya untuk memungut pajak hotel}}{\text{Anggaran biaya untuk memungut pajak hotel}} \times 100\%$$

Tabel 8 Rasio Ekonomi Atas Penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011

Tahun	Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2007	895.349.527	747.260.717	83,46	Ekonomis (< 100%)
2008	1.166.764.054	1.013.709.385	86,88	Ekonomis (< 100%)
2009	1.341.601.833	1.261.685.383	94,04	Ekonomis (< 100%)
2010	1.311.493.445	1.158.271.730	88,32	Ekonomis (< 100%)
2011	1.054.590.599	669.696.580	63,50	Ekonomis (< 100%)
Rata-rata	5.769.799.458	4.850.623.795	84,07	Ekonomis (< 100%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012 (data diolah)

Tabel 8 memperlihatkan rata-rata rasio ekonomi atas penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 adalah sebesar 84,07 persen. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio ekonomi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 94,04 persen, sedangkan rasio ekonomi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 63,50 persen.

Pajak restoran

Perhitungan rasio ekonomi dari kinerja penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 9.

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realiasi biaya untuk memungut pajak restoran}}{\text{Anggaran biaya untuk memungut pajak restoran}} \times 100\%$$

Tabel 9 Rasio Ekonomi Atas Penerimaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011

Tahun	Anggaran Biaya (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)	Rasio Ekonomi (%)	Kriteria
2007	377.617.125	279.497.906	74,02	Ekonomis (< 100%)
2008	447.180.021	361.196.109	80,77	Ekonomis (< 100%)
2009	479.081.498	512.782.372	107,03	Tidak ekonomis (>100%)
2010	480.228.762	500.189.028	104,16	Tidak ekonomis (>100%)
2011	409.932.545	363.380.114	88,64	Ekonomis (< 100%)
Rata-rata	2.194.039.950	2.017.045.529	91,93	Ekonomis (< 100%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012 (data diolah)

Tabel 9 menunjukkan rata-rata rasio ekonomi kinerja atas penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 adalah sebesar 91,93 persen dengan kriteria ekonomis. Berdasarkan hasil perhitungan, rasio ekonomi tahun 2007-2010 cenderung meningkat, namun tahun 2011 mengalami penurunan. Rasio ekonomi terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar 74,02 persen, sedangkan rasio ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2009 yaitu 107,03 persen. Tahun 2009 dan 2010 kinerja penerimaan pajak restoran tidak ekonomis. Ini menunjukkan adanya pemborosan biaya selama dua tahun itu atau mungkin saja adanya biaya tak terduga selama proses pemungutan pajak restoran.

Penilaian Kinerja atas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berdasarkan Rasio Efisiensi

Pajak hotel

Perhitungan rasio efisiensi dari kinerja penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 10.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realiasi biaya untuk memungut pajak hotel}}{\text{Realisasi penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

Tabel 10 Rasio Efisiensi Atas Penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Biaya (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2007	747.260.717	5.302.783.716	14,09	Sangat efisien (< 60%)
2008	1.013.709.385	8.632.572.121	11,74	Sangat efisien (< 60%)
2009	1.261.685.383	9.960.710.044	12,67	Sangat efisien (< 60%)
2010	1.158.271.730	9.121.366.106	12,70	Sangat efisien (< 60%)
2011	669.696.580	12.123.362.502	5,52	Sangat efisien (< 60%)
Rata-rata	4.850.623.795	45.140.794.489	10,74	Sangat Efisien (< 60%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012 (data diolah)

Tabel 10 menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi kinerja penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 sebesar 10,74 persen yaitu dengan kriteria sangat efisien. Berdasarkan perhitungan, rasio efisiensi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Semakin rendah rasio, menunjukkan kinerja yang semakin efisien. Rasio efisiensi terendah terjadi

pada tahun 2011 yaitu 5,52 persen dan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 14,09 persen.

Pajak restoran

Perhitungan rasio efisiensi dari kinerja penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 dapat dilihat pada Tabel 11.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi biaya untuk memungut pajak restoran}}{\text{Realisasi penerimaan pajak restoran}} \times 100\%$$

Tabel 11 Rasio Efisiensi Atas Penerimaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011

Tahun	Realisasi Biaya (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2007	279.497.906	1.983.095.710	14,09	Sangat efisien (< 60%)
2008	361.196.109	3.078.356.868	11,73	Sangat efisien (< 60%)
2009	512.782.372	4.047.697.294	12,67	Sangat efisien (< 60%)
2010	500.189.028	3.940.718.804	12,69	Sangat efisien (< 60%)
2011	363.380.114	5.224.307.864	9,96	Sangat efisien (< 60%)
Rata-rata	2.017.045.529	18.274.176.540	11,04	Sangat Efisien (< 60%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012 (data diolah)

Tabel 11 memperlihatkan bahwa rata-rata rasio efisiensi kinerja penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 sebesar 11,04 persen yaitu dengan kriteria sangat efisien. Berdasarkan perhitungan, rasio efisiensi mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Rasio

efisiensi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu 9,96 persen dan rasio efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 14,09 persen.

Penilaian Kinerja atas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Berdasarkan Rasio Efektivitas

Pajak hotel

Perhitungan rasio efektivitas dari kinerja penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 disajikan Tabel 12.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realiasi penerimaan pajak hotel}}{\text{Target penerimaan pajak hotel}} \times 100\%$$

Tabel 12 Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011

Tahun	Target Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Hotel (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2007	5.250.000.000	5.302.783.716	101,01	Sangat efektif (>100%)
2008	7.959.746.000	8.632.572.121	108,45	Sangat efektif (>100%)
2009	8.820.000.000	9.960.710.044	112,93	Sangat efektif (>100%)
2010	8.255.000.000	9.121.366.106	110,49	Sangat efektif (>100%)
2011	10.383.026.000	12.123.362.502	116,76	Sangat efektif (>100%)
Rata-rata	40.667.772.000	45.140.794.489	110,99	Sangat efektif (>100%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012 (data diolah)

Tabel 12 memperlihatkan rata-rata rasio efektivitas kinerja penerimaan pajak hotel di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem adalah 110,99 persen yaitu dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali tahun 2010

yang mengalami penurunan namun tetap dalam kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 101,01 persen, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 116,76 persen.

Pajak restoran

Perhitungan rasio efektivitas dari kinerja penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 disajikan Tabel 13.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realiasi penerimaan pajak restoran}}{\text{Target penerimaan pajak restoran}} \times 100\%$$

Tabel 13 Rasio Efektivitas Atas Penerimaan Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2007-2011

Tahun	Target Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2007	2.250.000.000	1.983.095.710	88,14	Cukup efektif (80%-90%)
2008	3.050.000.000	3.078.356.868	100,93	Sangat efektif (>100%)
2009	3.150.000.000	4.047.697.294	128,50	Sangat efektif (>100%)
2010	3.010.000.000	3.940.718.804	130,92	Sangat efektif (>100%)
2011	4.040.974.000	5.224.307.864	129,28	Sangat efektif (>100%)
Rata-rata	15.500.974.000	18.274.176.540	117,89	Sangat efektif (>100%)

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem, 2012 (data diolah)

Tabel 13 menunjukkan rata-rata rasio efektivitas kinerja penerimaan pajak restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem tahun 2007-2011 adalah 117,89 persen dengan kriteria sangat efektif. Berdasarkan perhitungan, rasio efektivitas cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, kecuali tahun

2011 yang mengalami sedikit penurunan namun tetap dalam kriteria sangat efektif. Rasio efektivitas terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 88,14 persen dengan kriteria cukup efektif, sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 130,92 persen.

Pada tahun 2010, realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami penurunan, sejalan dengan target yang mengalami penurunan pula. Ini disebabkan karena adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) yaitu mewabahnya virus rabies di Bali khususnya Kabupaten Karangasem. Dengan adanya virus ini, dikawatirkan terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Karangasem yang akan mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penilaian kinerja atas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan konsep *value for money* ditinjau dari sudut ekonomi adalah ekonomis. Rata-rata rasio ekonomi untuk pajak hotel 84,07 persen dan untuk pajak restoran 91,93 persen. Namun kinerja yang ekonomis ini perlu ditelusuri lebih lanjut lagi. Mungkin saja ada fenomena faktual di pemerintahan yang membuat anggaran longgar, sehingga kinerjanya terlihat selalu ekonomis. Kinerja penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ditinjau dari sudut efisiensi adalah sangat efisien, dengan rata-rata rasio efisiensi pajak hotel 10,74 persen dan pajak restoran 11,04 persen. Kinerja yang sangat efisien ini disebabkan karena Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem telah mampu meminimalisir biaya

yang digunakan untuk memungut pajak hotel dan pajak restoran dengan maksimal. Begitu juga dengan kinerja jika ditinjau dari sudut efektivitas adalah sangat efektif, dengan rata-rata rasio efektivitas pajak hotel 110,99 persen dan pajak restoran 117,89 persen. Namun kinerja yang sangat efektif ini juga perlu penelusuran lebih lanjut karena target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dibuat kecil, seharusnya lebih ditingkatkan lagi agar benar-benar mencerminkan potensi riil daerah Kabupaten Karangasem di sektor pariwisata.

Saran

1. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem hendaknya mampu mempertahankan kinerjanya yang ekonomis, efisien, dan efektif.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karangasem harus teliti, transparan dan tepat dalam penentuan anggaran atau target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, agar anggaran yang diperoleh benar-benar mencerminkan potensi yang dimiliki oleh daerah secara riil.
3. Target penerimaan pajak hendaknya lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan potensi riil daerah, melihat dari perkembangan pariwisata Kabupaten Karangasem yang terus meningkat.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Erawati, Ni Made. 2008. Analisis Kinerja Kawasan Metropolitan Sarbagita. ejournal.unud.ac.id/abstrak/adierawati.final.pdf. Diunduh tanggal 12, bulan Juni, tahun 2012
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Boisclair, Francois. 2008. Value For Money Auditing: CA. Dalam *CA Magazine*. 2, pp: 45-46.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi ke-1. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2 (1): h: 1-17.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugrahani, Tri Siwi. 2007. Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam *AKMENIKA UPY*. 1: h: 1-17.
- Puspitaningrum, Okta Nugrahadi. 2008. Implementasi Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Rembang. *Tesis*. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
- Roni Eka Putera. 2009. Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bukittinggi. *Jurnal Sprit Publik*. 5 (1) : h:85-98.